

**PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN SAGU  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU**

***INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF SAGO IN KEPULAUAN MERANTI  
RIAU PROVINCE***

**Gevisioner<sup>1</sup>, Agusnimar<sup>2</sup>, Saipul Bahri<sup>2</sup>, Azmansyah<sup>2</sup>, Selvia Sutriana<sup>2</sup>,  
Irzal Fakhrozi<sup>3</sup>, Ermawati<sup>2</sup>, Karyanti<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

<sup>2</sup>Universitas Islam Negri Suska Riau

<sup>3</sup>Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti

*Email : irgevisioner@gmail.com*

**ABSTRACT**

*The potential of such a large sago palm in Kepulauan Meranti Regency needs to get serious attention from various parties. One of the fundamental issues of sago commodity development efforts is the limited policy support and political will of the government in this field. The methodology used in this scientific paper is descriptive method and qualitative analysis. The results of the review indicate that therefore, other institutions are needed not only to help the community in marketing sago, but also to assist the community in the fulfillment of financial / venture capital. Institutional is very necessary because the existing institutions have not been able to play a maximum role. Sago will be of high value when strengthening is done through the aspects of cultivation, institutional both institutional marketing and financial institutions, and increased supply chain efficiency through government intervention. In order to support institutional strengthening of sago development in Meranti District, local governments should pay more attention to policies related to the institutional aspects of marketing and finance and sago downstream.*

**Keywords: institutional, policy, sago, added value.**

**ABSTRAK**

Potensi sagu yang begitu besar di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Salah satu persoalan mendasar dari upaya pengembangan komoditas sagu adalah masih terbatasnya dukungan kebijakan (policy) dan kemauan politik pemerintah dalam bidang ini. Metodologi yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah metoda diskriptif dan analisis kualitatif. Hasil review menunjukkan bahwa Oleh karena itu masih diperlukan kelembagaan lainnya tidak hanya lembaga tersebut membantu masyarakat dalam memasarkan produk sagu, tetapi juga membantu masyarakat dalam pemenuhan finansial/modal usaha. Kelembagaan ini sangat diperlukan karena kelembagaan yang ada belum mampu berperan maksimal. Sagu akan menjadi bernilai tinggi ketika penguatan dilakukan melalui aspek budidaya, kelembagaan baik kelembagaan pemasaran maupun kelembagaan keuangan, dan peningkatan efisiensi rantai pasok melalui intervensi pemerintah. Guna

mendukung penguatan kelembagaan pengembangan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti pemerintah daerah sebaiknya lebih memperhatikan kebijakan terkait dengan aspek kelembagaan pemasaran dan keuangan serta hilirisasi sagu.

**Kata kunci : kelembagaan, kebijakan, sagu, nilai tambah.**

## **PENDAHULUAN**

Potensi sagu yang begitu besar di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Pengembangan komoditas sagu dengan pendekatan sistem agribisnis akan lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan nilai tambah komoditas sagu di masa yang akan datang, sehingga sagu benar-benar mampu meningkatkan perekonomian daerah dan mensejahterakan pelaku agribisnis sagu. Namun agribisnis sagu belum berkembang dengan baik yang dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan pelaku agroindustri kecil. Petani selalu berada pada pihak yang lemah terutama berhadapan dengan pengusaha sagu. Di pihak lain pelaku agroindustri kecil terbentur pada pemasaran produk olahannya (Haryanto, B dan Pangloli, 2012).

Salah satu persoalan mendasar dari upaya pengembangan komoditas sagu adalah masih terbatasnya dukungan kebijakan (policy) dan kemauan politik pemerintah dalam bidang ini. Siapa institusi yang merasa bertanggung jawab dan berkewajiban mengembangkan kebijakan persaguan karena bidang ini lintas disiplin dalam analisisnya dan sektoral dalam implementasinya (Jong, FS dan A. Widjono, 2007). Permasalahannya adalah bagaimana kelembagaan yang terlibat dalam sistem agribisnis sagu mulai dari hulu sampai

hilir dapat mendorong keberhasilan pengembangan agribisnis sagu itu sendiri, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti?, sehingga nilai tambah yang diciptakan dapat dinikmati oleh pelaku agribisnis tersebut. Bagaimana aspek kelembagaannya ditinjau dari sosial ekonomi kelembagaan tersebut, baik aspek sosial ekonomi pelaku agribisnis, maupun dalam pengembangan agribisnis dan kebijakan pemasaran. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah menganalisis kelembagaan dalam mendukung pengembangan agribisnis sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

## **METODE**

Metodologi yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah metoda diskriptif dan analisis kualitatif. Data diperoleh dari studi pustaka dan hasil penelitian yang tersedia. Salah satu literatur yang direview adalah Penyusunan Masterplan Pengembangan Sagu (Balitbang Riau, 2017). Pengumpulan data dilakukan dilaksanakan selama 3 bulan yakni bulan Februari – Mei 2018.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Potensi Kelembagaan**

Permasalahan sagu di Kepulauan Meranti bukan saja tentang budidaya, namun masalah prioritas saat ini adalah kebijakan pemerintah yang belum kuat baik terhadap kelembagaan maupun terhadap pemasaran komoditas tersebut.

Petani sagu menghadapi beberapa masalah serius terhadap aspek pemasaran ini baik harga, jaringan maupun pemasaran produk hilir sagu. Keterbatasan pengetahuan petani sagu dan pelaku usaha menyebabkan ketergantungan pada pihak tertentu semakin kuat, sehingga diperlukan peran pemerintah baik Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam mengatasi masalah ini. Salah satu kelembagaan yang ada saat ini adanya koperasi dan BUMDES pada yang terdapat di masing-masing kecamatan (Balitbang Riau, 2017).

Jumlah koperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2016 adalah 280 koperasi yang terdiri dari 1 unit KUD dan 270 unit non KUD. Namun demikian fungsi koperasi yang ada belum dirasakan perannya oleh masyarakat terutama oleh pelaku pertanian sagu. Terdapat sebanyak 260 koperasi di Kepulauan Meranti. Dari jumlah tersebut hanya 92 koperasi yang aktif. Sedang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kepulauan Meranti berjumlah 11.016 (BPS Kepulauan Meranti, 2017). Mayoritas UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih memanfaatkan rentenir yang berkedok koperasi dibandingkan menjadi anggota koperasi.

Terdapat satu koperasi yang membantu petani sagu dan pemilik kilang sagu selama ini yaitu Koperasi Harmonis yang beralamat di Jalan Merdeka 92 Selat Panjang. Namun tidak semua masuk dalam koperasi ini, selain itu juga koperasi yang ada masih kosentrasi pada pemasaran tepung sagu terutama ke Cirebon.

Oleh karena itu masih diperlukan kelembagaan lainnya tidak hanya lembaga tersebut membantu masyarakat dalam memasarkan produk sagu, tetapi juga membantu masyarakat dalam pemenuhan finansial/modal usaha. Kelembagaan ini sangat diperlukan karena kelembagaan yang ada belum mampu berperan maksimal.

### **Potensi Pengembangan Teknologi Perkebunan Sagu**

Kilang sagu yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti menghasilkan dua produk utama yaitu tepung sagu basah dan tepung sagu kering. Pada umumnya tepung sagu kering dihasilkan oleh kilang sagu yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Tebing Tinggi. Sementara kilang sagu yang berada di kecamatan lainnya menghasilkan tepung sagu basah. Penggunaan teknologi untuk menghasilkan tepung sagu kering lebih tinggi jika dibandingkan dengan teknologi tepung sagu basah, karena memerlukan proses pengeringan lebih lanjut (Purwani, dkk, 2006)

### **Potensi Sumberdaya Pasar dan Pemasaran**

Jumlah produksi sagu dipengaruhi oleh jumlah permintaan, jumlah permintaan dapat diukur dengan mengetahui Total Permintaan Pasar, Wilayah Permintaan Pasar, Penjualan Aktual & Pangsa Pasar (*Market Share*). Pemasaran sagu di Kab. Kepulauan Meranti tidak hanya di pasar lokal, namun sudah di pasarkan ke luar negeri seperti Malaysia, Jepang dan

Korea. Sampai saat ini serapan sagu di dalam provinsi Riau masih rendah, sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah untuk menjadikan produk ini sebagai komoditas daerah yang membanggakan.

Karena keterbatasan pasar akhirnya sagu produksi petani Meranti dibeli dengan harga murah sehingga tidak bisa mendorong ekonomi petani Sagu secara maksimal. Hasil produksi tepung Sagu kering dan basah hingga saat ini masih dikirim ke Cirebon dari sana baru dipasarkan ke daerah lainnya. Akibatnya harga sulit dinaikan bahkan apabila Daerah Papua dan Maluku (penghasil sagu lainnya) panen maka harga sagu di Kepulauan Meranti

### **Analisis Kebijakan Pengembangan Sagu**

Kebijakan yang berhubungan langsung dengan pengembangan sagu meliputi kebijakan pemerintah baik pemerintahan pusat, provinsi Riau maupun Pemerintahan daerah. Kebijakan tentang sagu seharusnya meliputi kebijakan lahan perkebunan sagu, kebijakan budidaya sagu, kebijakan hilirisasi sagu, kebijakan tentang perlindungan komoditas sagu, kebijakan tentang pemanfaat hasil sagu, kebijakan tentang kelembagaan sagu dan kebijakan tentang keberlanjutan sagu sebagai komoditas unggul daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **Analisis Kelembagaan**

Kelembagaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi kriteria kelembagaan berkaitan dengan status

kawasan/wilayah/lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi pengembangan tanaman Sagu rakyat. Serta adanya pembinaan/perhatian dari Dinas/Instansi yang terkait untuk pengembangan tanaman Sagu. Bila melihat kelembagaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, aturan yang bersifat informal sudah ada dan dilaksanakan oleh masyarakat. diantaranya adalah:

- a. Kelembagaan Usahatani Sagu. Kelembagaan usahatani diwariskan secara turun temurun di kalangan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Perilaku masyarakat dalam menebang tanaman sagu yang menyisakan tanaman yang berada dalam satu rumpun sebagai cadangan tanaman berikutnya. Hal yang sama dilakukan pada proses penebangan batang rumbia yang diupahkan pada pihak kedua, yaitu tunas yang menempel pada pohon yang ditebang menjadi milik penebang. Hal yang sama juga dilihat pada proses pengangkutan batang sagu. Jalan untuk mengeluarkan batang rumbia dari kebun ke lokasi pengangkutan untuk dibawa ke kilang.
- b. Kelembagaan Pemasaran. Kelembagaan pemasaran informal di kalangan masyarakat meranti. Penjualan batang rumbia dengan sistem ijon yaitu petani sagu menjual batang rumbia yang belum siap untuk dipanen. Pohon Rumbia akan dipanen pada waktu mendatang, sedangkan harga ditetapkan pada saat perjanjian awal. Transaksi ini tidak wujud dalam kelembagaan

formal, namun perangkat transaksi antara petani dan pembeli/toke dituangkan dalam surat perjanjian.

- c. Kelembagaan keuangan. Secara informal pemenuhan modal kerja petani pada umumnya dengan cara meminjam uang kepada toke/pemilik kilang, pelunasan utang tersebut melalui penjualan batang rumbia. Kebiasaan ini telah berlangsung lama sehingga sudah terbangun kepercayaan pemilik modal dengan petani.

Selanjutnya kelembagaan formal yang sudah ada saat ini meliputi:

- a. Kelembagaan Usahatani. Sudah ada terbentuk kelompok tani sagu, seperti kelompok tani sagu yang berada di Desa Renak Dungun. Disamping jumlah kelompok tani tidak berkembang, juga keberadaan kelompok tani ini belum mampu memberikan dampak terhadap

perekonomian petani, hanya sebatas pengurusan penerimaan bantuan dari pemerintah.

- b. Kelembagaan Pemasaran. adanya perkumpulan industri/kilang sagu masyarakat yang berada dalam satu Koperasi Harmonis.
- c. Kelembagaan yang berupa aturan yang bersifat formal adalah peraturan dari pemerintah daerah Kepulauan Meranti untuk mengembangkan sagu. Peraturan ini hendaknya yang memberi insentif bagi masyarakat untuk melakukan penanaman sagu.

Adapun faktor yang Mempengaruhi Kelembagaan Pemasaran Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi harga jual, kepercayaan, kebutuhan ekonomi, langganan, organisasi, ketersediaan modal. Seperti yang dipaparkan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1.

Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Petani Menjual Pohon Rumbia Kepada Toke dengan Dua Lembaga Pemasaran (Balitbang Riau, 2017)

### Strategi Pengembangan Sagu

Alternatif strategi pengembangan diperoleh melalui matriks SWOT dengan memformulasikan strategi dengan cara penggabungan antara faktor lingkungan internal dan eksternal berdasarkan perhitungan matriks IFAS dan EFAS. Matriks SWOT bertujuan untuk mengevaluasi faktor internal dan

eksternal guna mendapatkan alternatif strategi utama yang saling menunjang. Sintesis dari unsur-unsur SWOT dengan skor tertinggi menghasilkan alternatif strategi (Stanton, Julie V. 2000). Analisis SWOT strategi pengembangan sagu berdasarkan evaluasi faktor lingkungan internal dan eksternal disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis SWOT pengembangan kapasitas pengelola sagu berdasarkan evaluasi faktor lingkungan internal dan eksternal, di Kab. Kepulauan Meranti

<i>Strategi SWOT</i>	<i>Kekuatan (Strengths)</i>	<i>Kelemahan (Weaknesses)</i>
Internal	(1) Potensi sumber daya alam (2) Sumberdaya petani (3) Nilai sosial dan budaya sagu (4) Sebagai sumber nafkah (5) Ada groindustri sagu basah & tepung sagu (6) Perhatian pemerintah (7) Sagu serbaguna (8) Ada sungai besar dan kecil (9) Pengelolaan sagu berprinsip kearifan lokal (tradisional) (10) Produksi sagu relatif stabil	(1) Peemasaran yang terbatas (2) Lembaga pemasaran belum adil (3) Kebijakan masih terbatas (4) Lemahnya koordinasi antar Lembaga (5) Akses permodalan terbatas (6) Sagu belum berstandar (7) Pengetahuan & keterampilan petani masih rendah (8) Minim sarana dan prasarana (9) Produk hilir sagu terbatas (10) Data petani sagu tidak tersedia dengan baik (11) Persaingan antara petani dan pengusaha
Eksternal		
<i>Peluang (Opportunities)</i>	<i>Strategi S-O</i>	<i>Strategi W-O</i>
(1) Adanya kemauan politik pemerintah (2) Sagu, diversifikasi pangan. (3) Adanya perkembangan teknologi di bidang pangan (4) Peluang ekspor sangat besar (5) Permintaan sagu dalam negeri cenderung meningkat. (6) Sagu merupakan tanaman multiguna	Mempersiapkan langkah-langkah untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam pengembangan sagu (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, O1, O2, O3, O5, O6, O7)	Mempersiapkan langkah-langkah untuk memperluas jangkauan pemasaran sesuai dengan permintaan konsumen (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, O1, O3, O4, O6, O7)

(7) Adanya Kepres RI Nomor 22 Tahun 2009		
<i>Ancaman (Threats)</i>	<i>Strategi S-T</i>	<i>Strategi W-T</i>
(1) Kontribusi sagu menurun. (2) Alih fungsi lahan sagu. (3) Kebijakan beras untuk masyarakat miskin (raskin). (4) Daya saing sagu rendah. (5) Terbatasnya kelembagaan dan lemahnya koordinasi antar Lembaga (6) Pembatasan perdagangan lintas batas (7) Kerusakan lingkungan (8) Persaingan dgn daerah lain	Meningkatkan potensi sagu sebagai sumber nafkah yang berdampak kepada peningkatan pemanfaatan sagu (S1, S2, S3, S4, S5, S7, T2, T3, T7, T8)	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, terutama kelembagaan pemasaran (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W9, W11, T2, T3, T5, T7)

Sumber : Balitbang Riau (2017)

### Kebijakan Operasional

Berdasarkan hasil rumusan strategi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal serta hasil analisis SWOT, maka ditetapkan kebijakan operasional pengembangan tanaman sagu tahun 2017-2025 (Tabel 6) sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan. Kebijakan operasional meliputi :
  - a. Pengembangan tanaman dan fasilitas pendukung untuk peningkatan mutu dan produktivitas tanaman sagu;
  - b. Jaminan terhadap ketersediaan bibit bermutu dan bahan baku industri;
  - c. Membantu fasilitasi dan pemberian insentif bagi pelaku agribisnis sagu.
2. Mempertahankan tegakan tanaman optimal sehingga dapat meningkatkan

produktivitas dan mutu hasil.

Kebijakan operasional meliputi :

- a. Pengendalian pemasukan dan pengeluaran ternak;
- b. Pengembangan fasilitas pendukung pembibitan dan penanaman dan pengolahan hasil
- c. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam penyediaan bibit berkualitas;
- d. Standardisasi bibit dan produk olahan.
3. Penguatan wilayah-wilayah basis produksi sagu melalui introduksi teknologi dan sistem manajemen yang efisien melalui pengembangan model kawasan pembibitan dan pengembangan sagu terintegrasi. Kebijakan yang ditempuh meliputi :
  - a. Perlindungan terhadap kawasan potensial pengembangan sagu.
4. Peningkatan SDM petani dan pelaku agribisnis sagu serta fasilitas pendukung, baik kuantitas maupun

kualitas untuk meningkatkan produktivitas usahatani sagu, sehingga mampu memberikan nilai tambah dan keberlanjutan usaha.

Kebijakan operasional meliputi:

- a. Peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM serta fasilitas penunjang lainnya;
  - b. Pengembangan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka peningkatan kompetensi SDM serta peningkatan fasilitas penunjang pengembangan sagu;
  - c. Menciptakan pelayanan prima dalam pemanfaatan fasilitas secara menyeluruh oleh petani dan pelaku agribisnis sagu lainnya. Manajemen pelayanan fasilitas harus dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di berbagai lokasi yang tersebar;
  - d. Penempatan fasilitas pelayanan di lokasi yang strategis dengan konsep minimalisasi beban pelayanan. Tingkat kebutuhan fasilitas pelayanan di masing-masing daerah ditentukan berdasarkan faktor luas kawasan pengembangan atau penduduk sesuai dengan jenis fasilitas masing-masing.
5. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan agribisnis dan koordinasi antara instansi terkait guna meningkatkan produksi dan keberlanjutan agribisnis sagu. Kebijakan operasional meliputi:
- a. Fasilitasi akses dan keterlibatan kelembagaan petani terhadap

berbagai program pengembangan agribisnis dan pembangunan daerah;

- b. Pengembangan kerjasama antar sesama lembaga agribisnis, antar lembaga petani dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengembangan sagu;
- c. Kemudahan dan fasilitasi bagi petugas dan petani dalam peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan sumberdaya sagu. Dalam jangka panjang pengembangan sumberdaya perlu juga menyangkut teknik perencanaan, pembinaan masyarakat, manajemen proyek, monitoring dan evaluasi merupakan beberapa aspek pembinaan yang harus ditingkatkan;
- d. Intensitas komunikasi dan kordinasi antara pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kerjasama dalam pengembangan teknologi, konsep, model dan manajemen pembangunan agribisnis sagu.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan dalam penguatan kelembagaan pengembangan sagu di kabupaten Kepulauan Meranti, hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait dengan kebijakan lahan perkebunan sagu, kebijakan budidaya sagu,



kebijakan hilirisasi sagu, kebijakan tentang perlindungan komoditas sagu, kebijakan tentang pemanfaat hasil sagu, kebijakan tentang kelembagaan sagu dan kebijakan tentang keberlanjutan sagu sebagai komoditas unggul daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Sagu akan menjadi bernilai tinggi ketika penguatan dilakukan melalui aspek budidaya, kelembagaan baik kelembagaan pemasaran maupun kelembagaan keuangan, dan peningkatan efisiensi rantai pasok melalui intervensi pemerintah.
3. Hilirisasi sagu merupakan elemen penting yang harus mendapat perhatian khusus dan harus didukung semua elemen yang ada.

#### **Rekomendasi Kebijakan**

Guna mendukung penguatan kelembagaan pengembangan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti pemerintah daerah memperhatikan kebijakan terkait dengan aspek kelembagaan pemasaran dan keuangan serta hilirisasi sagu. Beberapa aspek yang perlu dilakukan adalah (1). Adanya standarisasi mutu tepung sagu sehingga meningkatkan nilai tawar internasional, (2). Adanya standarisasi harga sagu sehingga memberikan nilai tambah yang maksimal pada setiap kelembagaan, (3). Perlindungan yang komprehensif terhadap komoditas sagu, (4). Aspek pemasaran yang mendunia tentang keunggulan sagu lokal bertaraf Internasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kepulauan Meranti. 2017. Kepulauan Meranti Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti. Selat Panjang.
- Balitbang Riau. 2017. Penyusunan Master Plan Pengembangan Sagu. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Pekanbaru
- Haryanto B. dan Pangloli P. 2012. Potensi dan Pemanfaatan Sagu. Kanisius. Yogyakarta.
- Jong FS dan Widjono A. 2007. Sagu: Potensi Besar Pertanian Indonesia. Jurnal Iptek Tanaman Pangan Vol. 2 No. 1 – 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengembangan Sagu ;
- Purwani EY, Widaningrum H, Setiyanto Savitri E, Tahir R. 2006. Teknologi Pengolahan Mi Sagu. Balai Besar PPP-BPPT.
- Stanton, Julie V. 2000. *The Role of Agribusiness in development : Replacing the Diminished Role of the Government in Raising Rural Income*. Jurnal of Agribusiness 18,2 (Spring 2000) 173-187. 2000 Agricultural Economics Association of Georgia